

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Aktivitas kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Malaysia merupakan hasil merepresentasikan implementasi konsep teori kerja sama internasional yang dikemukakan oleh K.J Holsti atas dasar kepentingan bersama, persamaan tujuan, upaya negara dalam penyesuaian kebijakan dan tindakan penyelesaian isu migrasi Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural. Rasa saling membutuhkan dan ketergantungan menciptakan dorongan bagi Indonesia dan Malaysia saling berhubungan satu sama lain. OCS didesain sebagai sistem yang menghubungkan proses rekrutmen, penempatan, pengawasan dan perlindungan PMI yang bertujuan mempersempit ruang gerak sindikat ilegal terkait PMI Nonprosedural. Perwujudan keberhasilan tujuan bersama dalam memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI.

Implementasi OCS diwujudkan melalui MoU tahun 2022 mengenai penempatan dan perlindungan PMI, membuat keuntungan 2 negara yang terikat. Walaupun OCS masih mengalami kendala terhadap implementasi realita lapangan fenomena PMI non prosedural masih ditemukan dilihat dari lonjakan jumlah deportasi PMI, yang memicu perhatian terkait perlunya penguatan, pengawasan dan optimalisasi. Raminya penyalahgunaan visa kunjungan (ASEAN Visa Exemption dan Social Visit Pass) dan banyaknya sindikat alias calo. Situasi ini menciptakan kendala terhadap optimalisasi, pelanggaran atas ketidakpatuhan terkait komitmen bersama, Malaysia melakukan pelanggaran penyimpangan dari OCS yang berdampak vital terhadap tujuan kerja sama. Kompleksitas yang ditimbulkan dapat terjadi ketegangan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia.

Isu PMI Nonprosedural menjadi krusial dikarenakan berhubungan langsung dengan perlindungan PMI. Eksistensi PMI di Malaysia memberikan dampak signifikan terhadap sektor perekonomian dan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Fenomena lonjakan angka penempatan PMI dan tingginya peminat pekerja menimbulkan permasalahan yang terus mengancam perlindungan

Pekerja Migran Indonesia Prosedural dan Nonprosedural. Dalam konteks kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Malaysia terkait optimalisasi penyelesaian permasalahan migrasi PMI Nonprosedural belum memenuhi parameter keberhasilan kerja sama internasional yang dikemukakan oleh K.J. Holsti, kepatuhan perilaku negara dalam menjalankan implementasi mekanisme bersama menjadikan kendala tercapainya prioritas kepentingan dan tujuan bersama.

Pemanfaatan mekanisme bersama yang tidak optimal menjadi puncak masalah hubungan Indonesia dan Malaysia. Realita implementasi akibat lemahnya integrasi pertukaran data antarnegara, maraknya jalur perekrutan non prosedural dan lemahnya perlindungan hukum terhadap PMI di Malaysia mengakibatkan kerusakan kepercayaan hubungan Indonesia dan Malaysia. Komitmen hubungan diplomatik terkait tata kelola PMI Nonprosedural melalui OCS menjadi kunci utama konsisten diplomatik terhadap kepatuhan sistem. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, kehadiran OCS merupakan suatu langkah strategis dalam pencegahan migrasi PMI non prosedural, akan tetapi kendala maupun hambatan dari implementasi sistem sangat bergantung terhadap penguatan komitmen sistem bersama dan penguatan dalam pengawasan.

## **5.2 Saran untuk Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini hanya berfokus pada indikator optimalisasi *One Channel System* dalam pencegahan permasalahan PMI Nonprosedural yang merujuk pada teori kerja sama internasional menurut K.J. Holsti sebagai alat ukur optimalisasi, penelitian selanjutnya disarankan untuk mencakup lebih luas dalam kajian mendalam terkait peran aktor non negara atau mengkaji pengaruh calo terkait mudahnya melalui jalur nonprosedural dengan memangkas prosedur birokrasi yang kerap kali dipercayai oleh CPMI guna meningkatkan efektivitas sosialisasi dan kebijakan OCS dengan tepat sasaran. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk bisa meneliti dengan objek dan subjek yang berbeda untuk menyempurnakandn mengembangkan penelitian ini.